

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Peperangan dan kekacauan telah lama berkecamuk di benua Afrika selama bertahun-tahun. Setelah kuasa-kuasa kolonial seperti Inggris, Italia, Perancis dan Belanda keluar pada tahun 1950-an dan 1960-an, kebanyakan negara-negara Afrika jatuh ke tangan para diktator komunis maupun fasis. Afrika terseret dalam kancan perang dan pertikaian antar suku dan antar etnik yang paling parah dan sulit dicarikan solusi damainya. Korban konflik dan perang yang masih terus berkecamuk di beberapa negara afrika seperti Sudan, Somalia dan Kenya banyak berjatuhan. Jauh sebelumnya, di Kongo, Rwanda, Nigeria pertikaian etnis atau suku lebih kental telah dibandingkan dengan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Wilayah Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*) adalah salah satu wilayah di Afrika yang sampai saat ini masih mengalami konflik berkepanjangan. Negara-negara diwilayah ini adalah Eritrea, Djibouti, Ethiopia dan Somalia. Tiga dari empat negara tersebut kerap kali berkonflik satu sama lain. Seperti Eritrea vs Ethiopia pada tahun 1998 hingga 2000 perihal perbatasan dan Ethiopia vs Somalia pada konflik Ogaden ditahun 1977 sampai 1978.

Somalia adalah salah satu negara di wilayah Tanduk Afrika yang mengalami konflik sampai saat ini. Konflik yang berkecamuk di kawasan ini

menimbulkan simpati dari masyarakat internasional. Tidak sedikit negara-negara dunia ikut berpartisipasi untuk membantu mengatasi konflik yang ada. Organisasi internasional seperti PBB (*United Nation*) sempat membentuk sebuah badan yang mengurus permasalahan yang terjadi di Somalia pada kurun waktu 1991 sampai 1995, yaitu UNOSOM (*United Nation Operation in Somalia*). Pemerintahan sementara (*Transitional Federal Government*) Somalia paska pemilu 2004 pun tidak menunjukkan indikasi yang lebih baik terhadap stabilitas politik dalam negeri Somalia.

Sebagai negara yang berada disatu wilayah yang sama, Ethiopia pun ikut serta dalam penyelesaian konflik di Somalia, dan keterlibatan mereka ternyata didukung oleh dunia internasional karena telah membantu memberikan keamanan kepada pemerintah federal sementara Somalia. Namun, hal ini sangat bertolak belakang tatkala melihat sejarah kebelakang tentang hubungan kedua negara tersebut di masa yang lampau. Mungkinkah ada sesuatu dibalik itu semua??

Berdasarkan paparan diatas, maka dalam kesempatan kali ini penulis mencoba mengupas tentang keterlibatan Ethiopia dan tertarik untuk mengajukan judul "*Intervensi Ethiopia dalam konflik di Somalia (2006-2008)*" sebagai judul skripsi.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi dan teori-teori hubungan internasional terutama yang berhubungan dengan konflik Somalia dan campur tangan Ethiopia.
2. Mengkaji lebih dalam tentang politik luar negeri yang diambil Ethiopia dalam konflik Somalia.
3. Menerapkan teori-teori Ilmu Hubungan Internasional pada kasus-kasus aktual sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang di pelajari selama masa perkuliahan.
4. Memenuhi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Ethiopia adalah salah satu negara yang berada di wilayah Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*). Setelah menjadi koloni Italia pada rentang waktu 1936 hingga 1941, diteruskan pemerintahan raja Haille Selassie (1941-1974), dan pada tahun 1974 Ethiopia dipimpin oleh Junta Militer Marxisme, Kolonel Mengistu Haile lewat kudeta berdarah. Ethiopia sangat akrab dengan bencana alam seperti musim kemarau dan banjir, biasanya wilayah pedesaan terkena dampak paling parah. Hasilnya, dibeberapa kawasan wilayah ini memiliki tingkat kekurangan gizi yang tinggi dan terus terancam dengan krisis

kemanusiaan. Antara tahun 1982 dan 1992, sekitar 2 juta penduduk tewas di wilayah ini akibat perang dan kelaparan.

Pada tahun 1991, Junta militer marxisme, Let.Kol. Haille Mengistu Meriam, digulingkan oleh koalisi pemberontak *People Revolutionary Democratic Front* pimpinan Meles Zenawi, dan dibentuk Pemerintahan Transisi Ethiopia (*Transitional Government of Ethiopia/TGE*) hingga tahun 1994. Pemilu multi-partai pertama dilakukan tahun 1995 dan hingga sekarang telah dilakukan 3 kali.

Sejak berada dibawah kepemimpinan Meles Zenawi, yang terpilih sebagai Perdana Menteri sejak 23 agustus 1995, banyak kemajuan yang diraih. Diantaranya adalah dengan terjalinnya hubungan luar negeri Ethiopia yang lebih luas dengan negara-negara besar yang dapat memacu perekonomian mereka terutama negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa (negara donor) serta RRC, dan Jepang (mitra dagang). Meles Zenawi yang berasal dari Partai EPRDF (*Ethiopian People Revolutionary Democratic Front*) telah berkuasa hampir selama 14 tahun. Hegemoni EPRDF dalam kancah perpolitikan Ethiopia dilanjutkan setelah partai ini lagi-lagi memenangkan pemilu pada Mei 2005¹ dengan meraih 296 dari 547 kursi diparlemen dan mencapai mayoritas absolut. Namun pemilu kemudian diulang karena adanya indikasi manipulasi yang dilakukan komisi pemilu bekerja sama dengan partai pemerintah.

Ethiopia dimata dunia internasional dikenal sebagai negara yang tergolong dalam negara miskin, karenanya Ethiopia banyak mendapat bantuan

¹ Partai EPRDF menangkan pemilu di Ethiopia, di akses dari <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2949161,00.html>

dari badan-badan dan organisasi-organisasi internasional, seperti *WHO*, *FAO*, *UNICEF* dan *NGO* asing yang membantu dalam mengatasi isu-isu sosial, terutama program HIV/aids dan bantuan pangan. Walaupun demikian, Ethiopia merupakan negara yang cukup disegani dan mempunyai pengaruh cukup kuat di wilayah Tanduk Afrika.

Di wilayah Tanduk Afrika Ethiopia berbatasan dengan Eritrea (utara), Djibouti-Somalia (timur), Kenya (Selatan) dan Sudan (barat). Hubungan antar negara Tanduk Afrika tiap dekade mengalami gejolak. Eritrea yang merupakan negara pecahan dari Ethiopia dan mendapatkan kedaulatan yang sah sejak tahun 1993 sampai saat ini masih menyimpan ketegangan dengan Ethiopia perihal perbatasan (1998-2000), meski sudah ditengahi dengan perjanjian damai (*The Algiers Peace Agreement*) dan referendum yang di prakarsai PBB pada tahun 2000. Hal ini ditengarai karena batas-batas wilayah yang sudah di tentukan pada perjanjian perdamaian tidak pernah disepakati secara langsung oleh Ethiopia dan Eritrea.

Namun tidak hanya dengan Eritrea, Ethiopia juga memiliki sejarah hubungan yang tidak harmonis dan tidak sehat dengan Somalia. Selama kebangkitan *Adal Sultanate* (multi-etnis kerajaan Ethiopia) pada abad ke-16, *Ahmad Ibnu Ibrihim Al-Ghazi*, tokoh Islam *Adal* yang berpengaruh di Somalia sudah menyatakan jihad terhadap Ethiopia. Di era modern terhitung sejak tahun 60-an (1960-1964) hingga awal 80-an, Ethiopia dan Somalia masih terlibat perselisihan. Yang paling populer dalam perselisihan kedua belah pihak adalah perang Ogaden (1977-1978). Perang meletus ketika Somalia berusaha

mengeksploitasi perubahan sementara di perimbangan kekuasaan daerah dalam keinginan mereka dan mengklaim wilayah Ogaden sebagai Somalia raya. Perang berakhir ketika Somalia menarik pasukan mereka dari perbatasan. Di era Pasca tahun 80-an, hubungan diantara kedua negara tidak mengalami perubahan. Ketegangan-ketegangan kecil masih sering terjadi di perbatasan.

Somalia yang dahulu bernama Republik Demokratik Somali, adalah sebuah negara yang eksis secara *de jure*. Somalia tidak memiliki otoritas pemerintah pusat yang diakui. Otoritas secara *de facto* berada di tangan pemerintah yang tidak diakui, yaitu *Somaliland* (bekas wilayah Britania Raya yang terletak di bagian barat laut Somalia), *Puntland* (wilayah bagian Timur laut Somalia), dan beberapa panglima perang (*warlord*) yang saling bermusuhan, di mana ketiga-tiganya memimpin pemerintahan oposisi.

Sejak kemunculan kembali Uni Mahkamah Islam atau UIC (*Union of Islamic Court*) yang di pimpin oleh *Sheikh Syarief Sheikh Ahmad* pada tahun 2005 di Somalia, pemerintah federal sementara (*TFG/Transitional Federal Government*) Somalia yang di pimpin oleh *Abdulah Yusuf* mendapat guncangan yang cukup kuat oleh kebangkitan mereka. Hal ini disebabkan karena Uni Mahkamah Islam dianggap cukup mampu mengatasi krisis dan menekan angka kekerasan yang ada di Somalia dengan syariat hukum Islam. Namun begitu, meskipun Uni Mahkamah Islam di dukung oleh segenap rakyat Somalia tetapi tidak begitu menurut dunia internasional. Uni Mahkamah Islam hanya dianggap sebagai pengganggu dan organisasi tempat berlindungnya teroris yang

mengganggu stabilitas pemerintah federal sementara/TFG yang diakui oleh dunia internasional.

Pemerintah federal sementara Somalia memang lemah sejak dipimpin oleh *Abdul Kassim Salat Hassan* hingga terpilihnya *Abdulah Yusuf* sejak tahun 2004. Kemunduran benar-benar dialami oleh pemerintah federal sementara Somalia, pasalnya sebagian besar wilayah selatan Somalia yang merupakan Ibukota negara telah di kuasai oleh Uni Mahkamah Islam (UIC), sementara pemerintah federal hanya mengendalikan sebagian kecil wilayah yang mengelilingi Baidoa, ditambah lagi dengan kurangnya dukungan bangsa Somalia. Di lain pihak Amerika Serikat yang masuk untuk ke Somalia sejak pertengahan tahun 2006 mengisyaratkan adanya sindikat terorisme yang berlindung di dalam Uni Mahkamah Islam Somalia. Sedangkan Ethiopia yang juga negara terdekat Somalia, sejak memutuskan terlibat langsung dengan konflik internal Somalia pada Juli hingga Desember 2006, sekitar 3000 – 4000 tentara Ethiopia telah dikerahkan dan ditempatkan di Somalia untuk menjaga dan melindungi pemerintah federal sementara Somalia dari gempuran Uni Mahkamah Islam. Mobilisasi pasukan Ethiopia pun meningkat hingga angka 8000 orang pasukan ketika memasuki awal tahun 2007.

Sebagai negara yang bertetangga, Konflik yang terjadi di Somalia cukup berdampak terhadap stabilitas negara Ethiopia. Karena sejak Uni Mahkamah Islam muncul kembali dan memerangi pemerintah federal sementara Somalia (TFG), banyak rakyat sipil Somalia yang mengungsi ke Ethiopia. Ethiopia mulai di banjiri oleh pengungsi Somalia yang ingin mendapatkan perlindungan. Sejak

bulan Juli 2006 ribuan pengungsi terus berdatangan ke wilayah timur Ethiopia. Pada waktu yang bersamaan, perlawanan Uni Mahkamah Islam menjadi semakin kuat dalam memerangi pemerintah federal sementara Somalia.

Terlibatnya Ethiopia dalam konflik di Somalia sebenarnya membawa banyak kerugian bagi Ethiopia. Mobilisasi yang mulai dilakukan sejak 20 Juli hingga Desember 2006, membutuhkan banyak dana dalam pelaksanaannya. Selain itu pasukan mereka yang terluka dan cidera juga butuh perawatan yang memakan dana yang tidak sedikit.

Konflik senjata yang terjadi di Somalia dalam kurun waktu 2006 – 2007 menelan korban hingga 14 ribu jiwa². Dan bukan hanya itu, bahkan sekitar 19.270 ribu orang lainnya terluka dan sekitar satu setengah juta rakyat Somalia hidup terlunta-lunta dibelantara hutan dan pemukiman pengungsian yang tak menentu. Tidak hanya itu dari pihak Ethiopia sendiri setidaknya 85 tentara mereka tewas dalam serta ratusan lainnya terluka dalam konflik tersebut³. Dan di tahun 2008, Ethiopia secara resmi akan menarik pasukan mereka. Meskipun keinginan tersebut telah tercetus dari awal tahun 2007.

² Perang Mogadishu 2006, Wikipedia, di akses dari http://www.wikipedia.com/Perang_Mogadishu_2006

³ Konflik Somalia 2007, di akses dari http://www.erasuslim.com/dalam_satu_tahun_14ribu_orang_meninggal_akibat_konflik_senjata_di_Somalia

D. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, muncul satu pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

Mengapa Ethiopia melibatkan diri dalam konflik Somalia 2006 – 2008 dengan membantu pemerintah Transisi Federal (TFG) Somalia, padahal hubungan kedua negara tidak harmonis??

E. KERANGKA DASAR TEORITIK

Teori Pembuatan Keputusan (William D. Coplin):

Salah satu yang konsepsi yang di kemukakan oleh Mohtar Mas' oed menyatakan bahwa teori dalam hubungan internasional dibentuk melalui pengembangan proposisi atau statemen-statemen tentang, misalnya perilaku rasional berdasar suatu motif dominan seperti kekuasaan. Teori seperti ini dibuat untuk menggambarkan perilaku politik aktor-aktor rasional⁴. Misalnya Morgenthau⁵ merumuskan suatu teori politik tentang keadaan politik internasional yang “dengan membuat gambar tentang kekuasaan politik yang rasional, teori itu bisa menunjukkan kontras antara ketiadaan politik yang senyatanya ada dan keadaan politik yang ingin diciptakan, tetapi tidak terwujud”. Konsepsi teori seperti ini melandasi pembuatan teori deterens, game theory, dan beberapa teori pembuatan keputusan.

⁴ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Yogyakarta: LP3ES, 1990) hal.22

⁵ W.T.R Fox (ed), Theoretical Aspects of International Relations (Univ. of Notre dame, 1959) hal.17

Adapun untuk menganalisa sebuah kebijakan luar negeri, penulis menggunakan *Decision Making Theory* (Teori Pembuatan Keputusan), khususnya *Foreign Policy Decision Making*. Teori Pembuatan Keputusan mengidentifikasi sejumlah variabel yang relevan dan mengemukakan saling keterkaitan yang mungkin ada dari berbagai variabel tersebut. Teori ini mengarahkan perhatian secara langsung bukan kepada negara sebagai abstraksi metafisik, atau kepada pemerintah, atau bahkan kepada institusi besar yang disebut “Eksekutif”, melainkan berusaha menonjolkan perilaku manusia khusus pembuat keputusan yang sesungguhnya membentuk kebijaksanaan pemerintah, yaitu mereka yang tindakan otoritatifnya, baik maksud maupun tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya atas nama negara⁶.

Menurut Teori Pembuatan Keputusan, politik luar negeri bisa dipandang sebagai output dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Tiga pertimbangan itu adalah :

- (1) Kondisi Politik Dalam Negeri,
- (2) Kemampuan Ekonomi dan Militer,
- (3) Konteks Internasional.

⁶ James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations; A Comprehensive Study*, terjemahan Amien Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito (Yogyakarta: Fisipol UMY, 1995); hal.373

Yaitu, posisi khusus negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional itu⁷. Bahwa, “*it assumed that decision-makers act within a total perceived environment that includes their national political system as well as the international system as a whole an international environment as well as an external environment*”⁸.

Menurut William D Coplin:

“...Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: **Pertama**, kondisi politik luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. **Kedua**, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. **Ketiga**, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi...”⁹.

Mengingat bahwa para pembuat keputusan bertindak “*within a total perceived environment*” maka persepsi memperoleh tempat penting dalam Teori Pembuatan Keputusan. Pemberian oposisi penting terhadap persepsi ini sangat

⁷ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional; Suatu Telaah Teoritis*, edisi ke-2 (Bandung; Sinar Baru, 1992), hal.30

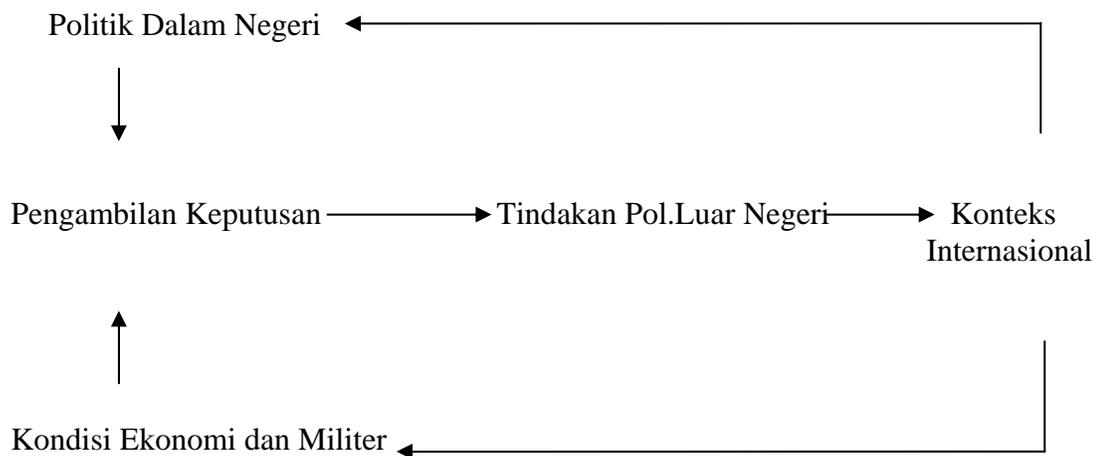
⁸ James E Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *op.cit.*, hal.470

⁹ William D. Coplin, *op.cit.*, hal.30

terkait dengan anggapan bahwa “*perceptions are guide actions*”¹⁰. Pentingnya persepsi dalam mendasari tindakan tidak dipengaruhi oleh benar-salahnya persepsi sehingga “*regardless of whether perceptions are inaccurate , the actions we take are grounded in our perceptions*”¹¹. Untuk lebih jelasnya, ilustrasi bagan dibawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.

Gambar 1:

Skema Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber: William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu telaah Teoritis (Bandung : Sinar Baru, 1992) hal.30

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa ketiga faktor tersebut diatas akan mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar politik luar negeri suatu negara. Untuk itu penulis akan menerapkan ketiga faktor tersebut dalam

¹⁰ Daniel S. Papp, Contemporary International Relations (New York: Macmillan, 1989), hal.154

¹¹ *Ibid*

pengambilan kebijakan politik luar negeri Ethiopia terhadap Konflik yang terjadi di Somalia.

Dalam hal ini politik luar negeri Ethiopia didasarkan pada:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri.

Dalam sebuah sistem politik banyaknya tuntutan dan dukungan yang bisa kita kategorikan sebagai *input*, sangat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan kebijakan. Input-input yang berupa dukungan dan tuntutan inilah yang nantinya akan membentuk kondisi politik suatu negara. Kondisi politik dalam negeri inilah yang akan sangat berpengaruh dan mempengaruhi para pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Bagaimanakah kondisi masyarakat terhadap suatu isu politik yang beredar, apakah ada tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat itu sendiri. Kondisi pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya akan dibuat (*Output*).

Kebijakan pemerintah Ethiopia dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri (*Domestic Politic*) yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Adanya dukungan dari sebagian besar elemen masyarakat Ethiopia terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka melibatkan diri dan mengirimkan pasukan masuk ke wilayah Somalia untuk mendukung Pemerintah Transisi Federal (TFG) Somalia. Dukungan dari segenap elit politik juga memperkuat kebijakan yang akan di buat selanjutnya. Apalagi sebagai Anggota dari *The Organisation of*

Africa Union/OAU (saat ini dikenal dengan istilah *Africa Union/AU*), sudah sepatutnya Ethiopia membantu pemerintah transisi Somalia (TFG) meskipun tidak diminta secara langsung sekalipun.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer.

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil, karena dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perekonomian suatu negara dapat dijadikan tolak ukur bagi kemampuan dan *bargaining position* negara dalam pergaulan internasional. Besarnya anggaran negara yang digunakan untuk sarana militer juga bisa dijadikan ukuran kekuatan negara untuk melindungi kepentingan nasional tersebut. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Semakin baik perekonomian dan militer suatu negara akan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kondisi perekonomian Ethiopia yang dinilai sangat lemah merupakan hambatan pada awal-awal kemerdekaan mereka, apalagi di dukung dengan kondisi negara yang dirundung oleh konflik dalam negeri (perang saudara) dan kemiskinan serta kelaparan penduduknya. Tetapi bantuan negara donor seperti Amerika Serikat memberikan angin segar terhadap tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan negara ini. Terhitung sejak September 1953, ketika pemerintah Ethiopia dan Amerika Serikat

menyepakati sebuah perjanjian saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu;

A mutual defense assistance agreement;

- (1) United States agreed to furnish military equipment and training, and* (Amerika Serikat setuju menyediakan perlengkapan militer dan pelatihan)
- (2) an accord regularizing the operations of a U.S. communication facility at Asmara.¹²* (mengatur operasi fasilitas komunikasi Amerika Serikat di Asmara dalam menagawasi gerak-gerik Soviet)

Lewat Anggaran tahun 1978, Amerika Serikat menyediakan dana sebesar \$282 juta untuk militer Ethiopia dan \$366 juta untuk membantu perekonomian Ethiopia di bidang Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Masyarakat dan Transportasi¹³. Bantuan dan suntikan dana yang diberikan oleh Amerika Serikat telah memberikan keuntungan yang sangat besar untuk Ethiopia, setidaknya mereka telah mendapat predikat sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat di wilayah Tanduk Afrika, meskipun pada masa Junta militer Haille Mengistu hubungan baik Ethiopia dan Amerika Serikat sempat terputus.

Dari segi kapabilitas militer, Ethiopia memiliki jumlah pasukan yang memadai dan setidaknya mendapat pengakuan dari dunia internasional.

¹² Ethiopia – United States Relations, Wikipedia, di akses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia%E2%80%93United_States_relations

¹³ *Ibid.*

Militer Ethiopia merupakan salah satu yang terbesar di Afrika dan menempati posisi 29 terbesar dunia¹⁴. Setidaknya sebelum jatuhnya kerajaan Haille Selassie, pendanaan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap militer Ethiopia menunjukkan bahwa kemampuan militer mereka sudah cukup kuat. Apalagi pada kekuasaan rezim Let.Kol. Haille Mengistu Meriam, Ethiopia sempat bekerja sama dengan Uni Sovyet dan sekutunya seperti Kuba dan mendapatkan pasokan senjata cukup banyak dari koleganya pada masa itu. Untuk wilayah Tanduk Afrika yang dihuni oleh Eritrea, Somalia dan Djibouti, Ethiopia memiliki kemampuan militer yang mumpuni dan sangat diperhitungkan. Dengan kondisi seperti ini, militer Ethiopia berusaha untuk tampil ke dunia internasional sebagai duta perdamaian yang diharapkan mampu merubah citra Ethiopia dimata internasional.

3. Konteks Internasional

Pengkajian tentang perilaku suatu negara juga difokuskan pada konteks internasional yang mempengaruhinya. Sifat sistem internasional dalam hubungan antar negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara ini akan membuat sebuah kebijakan. Situasi di negara yang menjadi yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara lain yang relevan dengan permasalahan yang

¹⁴ Ethiopian National Defense Force, Wikipedia, di akses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopia%E2%80%93Ethiopian_National_Defense_Force

dihadapi merupakan pertimbangan bagi *decision maker* dalam menentukan arah kebijakan luar negeri suatu bangsa.

Posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional sangat mempengaruhi atas sikap apa yang diwujudkan sebuah negara atas situasi yang terjadi. Kemunculan *UIC (Union of Islamic Court)* atau Uni Mahkamah Islam di Somalia, secara tidak langsung ikut mengancam kestabilan negara Ethiopia. Setidaknya apa yang telah dilakukan Uni Mahkamah Islam telah mengisyaratkan bahwa Somalia akan menjadi negara Islam di wilayah Tanduk Afrika. Hal ini diperkuat dengan ultimatum pihak Uni Mahkamah Islam dengan mengatakan, mereka akan membentuk negara *Great Somali* atau Somalia Raya yang berlandaskan syariat Islam.

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama nasrani (sekuler), kemunculan Islam dianggap sebagai sebuah ancaman yang cukup serius dan akan mengganggu stabilitas negara Ethiopia di wilayah Tanduk Afrika. Terlebih ada kelompok-kelompok minoritas Ethiopia yang selalu menebar terror di dalam negeri yang menuntut kebebasan mereka paska konflik Ogaden yang terjadi di masa lampau (1977-1978) yang akan mengikuti apa yang di lakukan oleh Uni Mahkamah Islam Somalia.

F. HIPOTESA

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan awal bahwa Ethiopia melibatkan diri dalam konflik Somalia 2006-2008, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya dukungan masyarakat Ethiopia terhadap kebijakan yang diambil serta dukungan dari elit baik eksekutif maupun legislatif.
2. Keadaan perekonomian dan militer Ethiopia yang relatif mampu untuk mengirimkan pasukan ke Somalia.
3. Konteks internasional, yaitu sebagai negara sekuler, Ethiopia tidak menginginkan Somalia tumbuh menjadi negara Islam karena akan mengganggu stabilitas negara dan mempertegas citra di mata internasional sebagai sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*).

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah sejak Juli 2006 (awal keterlibatan Ethiopia dalam konflik Somalia) sampai dengan tahun 2008 (ketika Ethiopia mulai menarik pasukannya dari Somalia). Namun begitu tidak menutup kemungkinan terhadap peristiwa-peristiwa yang masih relevan, meskipun terjadi di luar tahun tersebut.

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah, surat kabar, internet maupun dokumen-dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dan Deduktif Argumentatif.

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menggambarkan apa yang diungkapkan, serta data-data kepustakaan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari sekian banyak data yang terkumpul akan dipilih yang paling berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran masalah tersebut disertai pembahasan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang ada serta memiliki relevansi terhadap data yang ada.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, Terdiri dari pendahuluan, yaitu Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teoritik, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

Bab II, Membahas mengenai Ethiopia, baik itu gambaran umum negara, latar belakang historis (sejarah) serta hubungan luar negeri yang terjalin antara Ethiopia dengan dunia internasional.

Bab III, Membahas tentang Somalia dan dinamika konflik yang terjadi di Somalia.

Bab IV, Membahas tentang keterlibatan Ethiopia dalam konflik Somalia pada tahun 2006 sampai dengan 2008.

Bab V, Kesimpulan, Merupakan pembahasan terakhir atau penutup dari penulisan skripsi ini.